

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Richard Millhous Nixon adalah Presiden AS yang ke-37. Nixon juga satu-satunya Presiden dalam sejarah AS yang mengundurkan diri dari jabatannya pada tahun 1974. Setelah kematiannya pada 1994, beberapa pejabat Pemerintahan AS dan teman-teman Richard Nixon mendesak agar Nixon harus diingat untuk totalitas akan hidup dan karirnya, tidak hanya didasarkan pada skandal Watergate.

Skandal Watergate yang terjadi pada tahun 1972 hingga penyelesaiannya pada 1974 menjadi menarik untuk dikaji, karena krisis Watergate adalah studi kasus yang informatif dan sangat menarik mengenai korupsi, nafsu akan kekuasaan serta upaya untuk mengontrol dan menyalahgunaan kekuasaan. Lebih dari itu cerita mengenai Watergate menjadi penting karena krisis ini membuka kepada masa sinisme baik dari rakyat maupun kongres terhadap Pemerintahan yang bahkan setelah lebih dari seperempat abad Watergate menghiasi atmosfer politik AS. Akibat dari Watergate adalah pers yang lebih tajam, publik yang lebih apatis terhadap Pemerintah, hubungan eksekutif-legislatif yang pecah serta konflik antar partisan yang semakin sengit. Maka, Watergate adalah salah satu awal untuk

Bagi studi Hubungan Internasional, peristiwa Watergate dan Kepemimpinan AS semasa Presiden Nixon memberikan sebuah masa dimana seorang Presiden dari Negara Adikuasa seperti AS mengalami sebuah tragedi kelam sejarah Kepresidenan AS atas sebuah kecurigaan mendalam yang berhadapan dengan kemampuan serta visi politik yang hebat. Peran Nixon dalam melepaskan AS dari Perang Vietnam, membuka hubungan AS dengan China dan persetujuan penting dalam pembatasan kekuatan militer dengan Uni Soviet adalah sebuah potret keberhasilan diplomasi seorang Nixon dalam Hubungan Luar Negeri.

Nixon juga membuat sejumlah kebijakan domestik yang progresif, termasuk dalam bidang lingkungan dan perlindungan terhadap konsumen semuanya adalah dinamika penuh warna yang ujungnya berupa pengunduran diri Presiden dengan segala kesalahan yang sulit dipahami serta dengan menghalangi penyelidikan terhadap sejumlah pembantunya atas skandal tersebut, membuat nama Nixon akan selamanya dikaitkan dengan satu kata: Watergate.

Bagaimana Watergate terjadi? Kenapa Presiden seperti Nixon yang dapat dikatakan berhasil dalam kebijakan Luar Negerinya dapat terlibat dalam skandal seperti ini? Hal-hal seperti inilah yang menarik penulis untuk mengkaji permasalahan ini lebih mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul "Sejarah dan Dampak dari Peristiwa Watergate"

## **B. Latar Belakang Masalah**

Richard Millhous Nixon dilantik sebagai Presiden ke-37 Amerika Serikat (AS) pada 20 Januari 1969 dengan mengalahkan calon dari Partai Demokrat, Hubert H. Humprey. Selama masa Kepresidenannya hingga tahun 1974, Nixon dihormati sebagai seorang negarawan terkemuka oleh rakyat Amerika karena keberhasilannya dalam bidang luar negeri ketika menjabat sebagai Presiden.<sup>1</sup> Setidaknya ada 3 kebijakan penting di bidang Luar Negeri yang berhasil dicapainya: mengakhiri perang Vietnam, membuka pintu terhadap hubungan dengan China dan negosiasi *détente* dengan Uni Soviet.

Nixon menjadi Presiden ketika perang Vietnam menemui jalan buntu. Sebuah perang yang dimulai sejak tahun 1955 ketika AS terlibat dalam upaya menghalangi keinginan Vietnam Utara untuk menyatukan Vietnam Selatan dibawah kekuasaan Vietnam Utara yang Komunis. Keterlibatan AS di Vietnam kemudian menyebabkan percekcoakan di dalam Negeri, gerakan protes, munculnya perlawanan terhadap budaya oleh kaum muda dan tumbuhnya ketidakpercayaan terhadap Pemerintah dan Militer. Proses panjang, lambat dan hampir tidak menarik menempatkan AS di Vietnam. Keputusan oleh Presiden Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy dan Lyndon B. Johnson membawa AS lebih jauh masuk kedalam perang di Asia Tenggara yang pada 1969 mencapai titik kulminasi dengan banyak warga Amerika yang melihat AS yang tidak dapat memenangi perang. Pada akhir

---

<sup>1</sup> Michael Nelson, *CQ's American Government A To Z Series The Presidency A to Z*, Third

Januari 1969 Nixon memutuskan Ia akan melakukan penarikan bertahap dan menyebarkan gerakan anti-perang di dalam Negeri.

Keinginan mencapai perdamaian secara terhormat dalam perang Vietnam membuat Nixon pada Januari 1969 mengumumkan penarikan secara bertahap dan mengurangi jumlah personel militer AS di Vietnam serta menyebarkan gerakan anti perang di dalam Negeri. Pada Juni 1969 Presiden Nixon mengumumkan penarikan pertama sejumlah 25.000 tentara dari basis kekuatan AS di Vietnam Selatan.<sup>2</sup> Melalui program *Vietnamization*, pertempuran kemudian hanya dipusatkan di Vietnam Selatan dengan secara berangsur-angsur Vietnam Selatan diupayakan agar sanggup untuk mengambil alih tanggung jawab pertahanannya dengan tetap mendapat dukungan dari tentara AS, baik berupa peralatan, dukungan udara serta bantuan ekonomi.

Penarikan pasukan terus dilakukan hingga pada akhir 1970 jumlah personel militer AS di Vietnam Selatan telah dikurangi hingga 335.000 personel saja. Sementara penarikan terus dilakukan, pembicaraan damai masih menemui jalan buntu. Namun di akhir tahun 1971, AS telah menyerahkan tanggung jawab penuh untuk pertempuran darat kepada Vietnam Selatan meskipun dukungan udara masih tetap dipertahankan. Jumlah personel militer terus menurun hingga hanya berjumlah 160.000 personel militer.

Sementara negosiasi yang terus dilakukan akhirnya membuahkan hasil.

Negosiasi antara Penasehat Keamanan Nasional, Henry Kissinger dan Menteri

Luar Negeri Vietnam Utara Le Duc Tho mencapai kesepakatan pada Oktober 1972, dan Kissinger mengumumkan bahwa perdamaian sudah ditangan.

Sejumlah negosiasi yang terus dilakukan akhirnya mencapai kesepakatan baru pada 27 Januari 1973 di Paris. Perjanjian itu mengakomodasi antara lain gencatan senjata segera, penarikan seluruh personel militer AS dan pembebasan tahanan perang. Perang itu sendiri bagi AS baru benar-benar berakhir ketika Gerald Ford, Presiden yang menggantikan Nixon pada 1974 mengumumkan berakhirnya perang pada 23 April 1975 yang ditandai dengan tidak diberikannya lagi bantuan kepada Vietnam Selatan, baik ekonomi maupun militer. Namun, meski Presiden Ford yang mengumumkan berakhirnya perang, Nixon akan tetap diingat atas jasanya yang merintis jalan keluar AS dari Vietnam.

Sementara perang perlahan mulai mereda, Pemerintahan Nixon juga dihadapkan pada kekuatan-kekuatan utama ideologi komunis, Republik Rakyat China (RRC) dan Uni Soviet. Sebuah langkah dramatis dilakukan Nixon ketika pemerintahannya membuka pintu hubungan terhadap China setelah selama 2 dekade sejak kemenangan Mao Zhedong, AS lebih memperlihatkan dukungannya kepada Pemerintahan Nasionalis Taiwan sebagai representasi China.

Diplomasi skala kecil mulai dilakukan Pemerintahan Nixon dengan memperlunak pembatasan perdagangan dan kunjungan terhadap China. Hal ini membuat China memberi indikasi kepada AS untuk melakukan diplomasi

sebuah kunjungan rahasia ke Beijing. Kunjungan ini untuk bertemu Perdana Menteri Chou En Lai dan mengatur sebuah kunjungan yang akan dilakukan Nixon ke China tahun berikutnya.<sup>3</sup>

Akhirnya di awal 1972 selama seminggu di bulan Februari, Nixon bertemu Chou En Lai di China. Setelah pertemuan, Pemerintah AS secara formal mengakui prinsip satu China, bahwa hanya ada satu China dan Taiwan adalah bagian dari China, selain mengakhiri patroli di selat Taiwan serta mencabut pembatasan dan kunjungan personal ke China.<sup>4</sup>

Membaiknya hubungan dengan China, memberi Nixon keuntungan dalam hubungan AS dengan Uni Soviet. Pada 22-29 Mei 1972, Nixon mengadakan kunjungan kenegaraan ke Moskow dan mengadakan sejumlah pertemuan dengan pemimpin Soviet, Leonid Brezhnev yang menyepakati pembatasan cadangan misil, kerjasama dalam bidang perdagangan serta yang terpenting adalah terbentuknya *The Strategic Arms Limitation* mengenai pembatasan perkembangan senjata nuklir dan sistem anti senjata balistik.<sup>5</sup> Hal ini kemudian menjadi prinsip dasar hubungan AS-Soviet yang membentuk sebuah hubungan baru antara kedua Negara dalam sebuah era yang disebut *détente*.

Perlahan rivalitas antara AS-Soviet mulai dikurangi tingkat ketegangannya. Keberhasilan Nixon ini menempatkannya pada satu titik

---

<sup>3</sup> *Nixon's Foreign Policy* (accessed Mey 22, 2007); available from [http://pbs.org/wgbh/amex/presidents/37\\_nixon/nixon\\_foreign.html](http://pbs.org/wgbh/amex/presidents/37_nixon/nixon_foreign.html).

<sup>4</sup> Steven W. Hook and John Spanter, *American Foreign Policy Since World War I*, Fifteenth

tinggi dalam kapasitasnya sebagai Presiden serta membuat sebuah fondasi bagi AS dalam negosiasi lanjutan dengan Uni Soviet.

Sukses dalam kebijakan luar negeri, Nixon pun berhasil membuat sejumlah kebijakan domestik yang progresif. Sebagai Presiden, Nixon mengatur kontrol terhadap gaji dan harga-harga, membentuk jaminan sosial sebagai antisipasi terhadap naiknya inflasi dan menciptakan *Suplement Security Income (SSI)* yang memberikan jaminan pendapatan kepada panti jompo, orang buta dan cacat, setelah sebelumnya program sejenis ditolak oleh Kongres. Nixon juga menciptakan *Environmental Protection Agency (EPA)* berupa regulasi dan kontrol yang mengatur mengenai lingkungan hidup<sup>6</sup>, serta secara dramatis meningkatkan gaji pegawai Pemerintahan Federal AS di seluruh dunia.<sup>7</sup> Selama pemerinatah Nixon pula terbentuk sejumlah agen-agen pemerintahan lain, termasuk *the Costumer Product Safety Commission*, *the Occupational Safety and Healthy Administration* dan *the Drug Enforcment Administration*.

Di bidang ekonomi, kebijakan Nixon's New Policy pada Agustus 1971 sebagai respon atas naiknya inflasi, meningkatnya pengangguran dan memburuknya perdagangan serta mengontrol harga-harga hanya berhasil untuk sementara waktu sampai akhir tahun 1972, karena kemudian inflasi kembali naik hingga 6,2% pada 1973 dan 11% pada 1974.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Paul Finkelman, *The Encyclopedia of American Political History*, ed. Peter Wallenstein (Washington DC: CQ Press A Division of Congressional Quarterly INC, 2001), p. 272.

<sup>7</sup> *Domestic Policies* (accessed July 21, 2007); available from [http://en.wikipedia.org/wiki/Richard\\_Nixon#Domestic\\_policies](http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Nixon#Domestic_policies).

<sup>8</sup> *Domestic Policies* in *Encyclopedia Britannica*, 2005 ed.

Menjelang Pemilihan Umum 1972, banyak hal telah berjalan sangat baik bagi Presiden. Hal ini tentu didasari sejumlah kesuksesan politiknya, baik kebijakan Luar Negeri maupun domestik. Tim Pemenangan Nixon kemudian membentuk 2 strategi (1) *proaktive* dan (2) *predatory*. *Proaktive* didesain untuk menunjukkan keberhasilan-keberhasilan Presiden. *Predatory* didesain untuk menyerang dan menghancurkan calon dari kubu Demokrat.<sup>9</sup>

Akhirnya pada 7 November 1972, Richard Nixon terpilih kembali sebagai Presiden dengan keunggulan yang sangat mutlak. Ia memenangkan pemilihan dengan mendapatkan 61% *popular vote*. Nixon menang di semua Negara Bagian kecuali Massachusetts. Ini adalah kemenangan paling mutlak yang pernah terjadi dalam sejarah Kepresidenan AS.<sup>10</sup>

Namun, sekitar 2 tahun kemudian, tepatnya pada 9 Agustus 1974 Nixon memilih mengundurkan diri dari jabatannya setelah sebelumnya *House Judiciary Committee* pada bulan Juli 1974 mengeluarkan 3 artikel *impeachment* kepadanya. Posisi Nixon kemudian digantikan wakilnya Gerald Ford.

### **C. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang muncul adalah "Mengapa Presiden Nixon memilih untuk mengundurkan diri meskipun Ia berhasil dalam membuat sejumlah Kebijakan Luar Negeri dan Domestik serta menang mutlak dalam pemilihannya kembali?"

---

<sup>9</sup> Michael A. Conway, *The Watergate Crisis* (London: Green Wood Press, 1999), p. 18

## **D. Kerangka Dasar Teori**

### **Teori Legitimasi**

Salah satu elemen penting dalam politik adalah legitimasi. Legitimasi berkaitan dengan apakah rakyat menerima atau tidak hak moral dari pemimpin politik untuk membuat keputusan-keputusan atas mereka, dan hanya rakyat yang dapat memberikan legitimasi.<sup>11</sup> Selain itu, legitimasi juga dapat diartikan bahwa kedudukan seseorang atau sekelompok penguasa dapat diterima secara baik, karena sesuai dengan azas-azas dan prosedur yang berlaku dan yang dianggap wajar.<sup>12</sup> Sedangkan menurut Max Webber, legitimasi merupakan suatu hubungan yang harmonis antara penguasa dengan yang dikuasai, dimana yang dikuasai menerima keabsahan kekuasaan superior dari penguasa.<sup>13</sup>

Karena itu dapat dikatakan bahwa esensi pokok dan legitimasi adalah otoritas (kekuasaan). Sedangkan otoritas dapat didefinisikan sebagai alat untuk memerintah atau untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian, jika kita mengatakan bahwa seseorang memiliki otoritas, maka kita mengakui hak orang tersebut untuk mengatur, memberi perintah dan membuat keputusan. Dan ketika kita menentangnya, berarti kita meragukan kekuasaan orang tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa otoritas menyangkut kekuatan (*power*) antara penguasa dan yang dikuasai, yang mengandung unsur dukungan dan kepatuhan dari yang dikuasai terhadap penguasa.

---

<sup>11</sup> Charles F. Adrain, *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), p. 203.

<sup>12</sup> Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1993), pp. 37-38

Menurut Charles Adrain, untuk mendapatkan kekuasaan, seorang penguasa dapat memperolehnya dari lima sumber, yaitu: *Pertama*, penguasa atau pemimpin dapat memperoleh kekuasaan dari sumber-sumber primordial. *Kedua*, kekuasaan juga dapat diperoleh dari sumber-sumber yang suci, misalnya orang Jepang dahulu mungkin sampai sekarang sangat mempercayai bahwa Kaisar mereka merupakan keturunan Dewa Matahari. *Ketiga*, kekuasaan yang diperoleh dari sumber-sumber personal. Penguasa memperoleh kekuasaan dari rakyat karena ia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. *Keempat*, kekuasaan juga dapat diperoleh dari sumber-sumber yang diperoleh penguasa, karena keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai selama ia berkuasa. *Kelima*, kekuasaan juga dapat diperoleh melalui proses hukum tertentu, misalnya atas dasar undang-undang, hukum dan pemilihan umum.

Dengan dimilikinya sumber-sumber kekuasaan, seseorang akan mendapatkan legitimasinya. Legitimasi menjadi sangat penting bagi para penguasa, karena dapat berfungsi sebagai pengendali konflik, menciptakan stabilitas dan menjalankan kekuasaan. Tanpa adanya legitimasi maka penguasa akan sulit untuk mengelola konflik yang sangat diperlukan untuk menjamin stabilitas dan kelangsungan Pemerintahannya. Legitimasi politik yang rendah akan menimbulkan masalah bagi penguasa yang biasanya ditandai dengan ketidakstabilan politik. Ketidakstabilan politik tersebut jika dibiarkan, akan mengakibatkan krisis legitimasi yang pada akhirnya menyebabkan jatuhnya Pemerintahan. Krisis legitimasi adalah deficit

legitimasi, yaitu tidak mungkin sarana-sarana administratif menjaga atau menetapkan struktur-struktur normatif yang didukung motivasi yang cukup.<sup>14</sup>

Krisis legitimasi terjadi ketika kepercayaan legislatif maupun masyarakat turun karena ketidakmampuan sistem menjamin dan memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga mengakibatkan berkurangnya dukungan terhadap Pemerintahan. Oleh karena itu, pembangunan legitimasi politik merupakan hal pertama yang harus dilakukan oleh seorang penguasa ketika ia mulai berkuasa. Hal ini bertujuan agar kekuasaannya dapat diterima dan dapat bertahan lama.

Salah satu tipe legitimasi adalah legitimasi prosedural. Dengan legitimasi prosedural, penguasa maupun mereka yang dikuasai sama-sama menerima supremasi hukum. Warga negara menerima pemimpin-pemimpin mereka karena mereka membuat keputusan-keputusan berdasarkan prosedur-prosedur hukum; para penguasa memperoleh jabatan setelah ditunjuk atau dipilih berdasarkan prosedur-prosedur yang ditetapkan secara hukum.<sup>15</sup> Hal ini menjadi relevan dengan teori Charles Adrain mengenai sumber-sumber untuk mendapatkan kekuasaan, yaitu melalui proses hukum tertentu, misalnya atas dasar undang-undang, hukum dan pemilihan umum. Tipe legitimasi ini dapat dikatakan sebagai yang populer dalam politik kontemporer dunia saat ini. Seorang penguasa dapat mendapatkan kekuasaannya melalui proses-proses hukum yang berlaku, antara lain melalui Pemilihan Umum.

---

<sup>14</sup> F. Budi Hardiman, *Menuju Masyarakat Komunikatif, Ilmu Masyarakat, Politik dan Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), pp. 160-161.

<sup>15</sup> Adrain, *op. cit.*, pp. 210-211.

Dalam permasalahan yang hendak dibahas, Richard Nixon berhasil membangun legitimasi yang kuat menjelang pemilihannya kembali sebagai Presiden AS pada 1972. Konstitusi AS, yang dapat dijadikan dasar hukum dalam Pemilihan Umum di AS memperbolehkan setiap warga AS yang mengakui konstitusi AS dipilih sebagai Presiden. Nixon yang terpilih pertama kali sebagai Presiden AS pada 1969 kemudian mencalonkan diri kembali empat tahun kemudian. Hal ini dapat dibenarkan, karena sesuai dengan konstitusi AS mengenai masa jabatan seorang Presiden, dalam *Article II Section 1* Konstitusi AS, "The executive power shall be vested in a president of the United States of America. He shall hold his office during the term of four years, and, together with the vice-president, chosen for the same term,...."<sup>16</sup>

Dalam mempertahankan posisinya sebagai Presiden AS dalam Pemilu 1972, banyak hal sebenarnya yang berjalan sangat baik bagi Presiden. Ia memperoleh legitimasi sangat tinggi karena kebijakan yang dilaksanakannya berjalan dengan baik, baik kebijakan domestik dan, terutama kebijakannya di Bidang Luar Negeri. Namun, strategi *predatory* yang diciptakan oleh tim pemenangan kembali Presiden Nixon juga mencakup kesuksesan mengeliminasi penantang-penantang dari Partai Demokrat, termasuk penggunaan *dirty tricks*, seperti *Operation Sedan Chair*, yaitu usaha untuk menggoda kandidat Demokrat dengan apa yang disebut *black advances*.<sup>17</sup> Semuanya bermuara pada *attitude* Nixon yang memandang gagasan mengenai

konfrontasi politik adalah dapatkan mereka sebelum mereka mendapatkanmu, yang menjelaskan pandangannya bahwa politik menggunakan kekuatan hukum rimba. Hal ini kemudian seolah diamini oleh para pembantunya dengan melakukan serangkaian tindakan ilegal demi keberhasilan Nixon.

Akhirnya skandal Watergate pun terjadi. Skandal Watergate menjadi tidak biasa ketika di akhir pengungkapannya Presiden sendiri terlibat secara mendalam dalam sebuah skandal dalam Pemerintahannya sendiri. Namun terungkapnya skandal ini pun pada awalnya tidak berpengaruh terhadap legitimasi Nixon untuk terpilih kembali sebagai Presiden. Dalam Pemilu yang berlangsung beberapa bulan setelah terungkapnya skandal Watergate, Nixon berhasil memenangkan Pemilihannya kembali untuk masa jabatan keduanya.

Meskipun dalam skandal tersebut Nixon tidak terlibat secara langsung, dan lebih pada usaha para pembantu dekatnya, tetapi usaha Nixon menutup-nutupi skandal tersebut menjelaskan bahwa Nixon tidak ingin kehilangan legitimasinya, yang jika tidak dilakukannya berpotensi menggusurnya lebih cepat.

Pada awalnya, strategi menutup-nutupi ini berjalan dengan sukses. Dapat dilihat dari indikasi sukses besar Nixon untuk menduduki kursi Kepresidenan untuk yang kedua kalinya. Namun, penutup-nutupan itu akhirnya terbongkar setelah melalui sejumlah penyelidikan dan ditemukannya bukti-bukti rekaman untuk memisahkan Presiden dari skandal ini serta sejumlah kesaksian dari sejumlah pembantu dekat Nixon. Maka ketika semua

bahwa Ia telah kehilangan legitimasinya, baik dari Kongres AS (Senat dan House) maupun dari rakyat Amerika sendiri.

Hilangnya legitimasi terhadap Nixon dapat dilihat dari indikasi ketika *The House Judiciary Committee* yang ditunjuk Kongres untuk menyelidiki cukup tidaknya dasar bagi pemberhentian Nixon mulai meloloskan satu-persatu artikel *impeachment* terhadap Nixon di Bulan Juli 1974 setelah Nixon bersikukuh menolak menyerahkan bukti rekaman pembicaraannya untuk menghentikan penyidikan terhadap skandal Watergate. *Impeachment* adalah sebuah proses konstitusional yang memberikan Kongres hak untuk mengontrol penyalahgunaan kekuasaan.

Metode *impeachment* membolehkan Kongres untuk mencabut mandat pejabat yang terbukti bersalah melakukan kesalahan serius, dengan kata lain ketika *impeachment* diloloskan terhadap seorang pejabat pemerintahan, maka ketika itu pula Ia telah kehilangan legitimasi dari Kongres. Konstitusi Amerika *Article II Section 4*, menyatakan bahwa, "The president, vice-president, and all civil officers of The United States shall be removed from office on impeachment for, and conviction of, treason, bribery, or other high crimes and misdemeanors."<sup>18</sup> *Treason* dapat diartikan pengkhianatan, *bribery* adalah suapan dan *high crimes* berupa kejahatan tingkat tinggi serta *misdemeanors* adalah kejahatan yang tingkatannya dikategorikan lebih

Prosedur *impeachment* di Amerika Serikat awalnya diproses di *The House Judiciary Committee* untuk kemudian dibawa ke tingkat *House of Representatives* dan diputuskan di tingkat *Senate*. Dalam kasus Nixon, ketika Komite mengeluarkan 3 artikel *impeachment*, Presiden kemudian mengundurkan diri sebelum artikel *impeachment* tersebut dibawa ke tingkat *House*. Berdasarkan resolusi yang dikeluarkan oleh Komite, Nixon terkena *impeachment* atas dasar kejahatan tingkat tinggi dan kejahatan yang tingkatannya berkategori lebih rendah (*high crimes and misdemeanors*).<sup>19</sup> Usaha Nixon menutup-nutupi skandal, menolak memberikan bukti rekaman dan menghalangi pemeriksaan terhadap sejumlah pembantunya dinilai Kongres sebagai pelanggaran yang cukup untuk memenuhi terbitnya *impeachment* terhadap Nixon dan sesuai konstitusi AS.

Artikel pertama *impeachment* berupa tuduhan menghalang-halangi penegakan keadilan, sementara artikel kedua dan ketiga berupa penyalahgunaan kekuasaan kekuatan presiden dan penghinaan terhadap Kongres.<sup>20</sup>

*Impeachment* ini memperlihatkan kepercayaan Kongres yang notabene merefleksikan rakyat Amerika telah hilang. Nixon tak dapat menghindar lagi, Ia menyerahkan bukti sisa rekaman mengenai rencana menutup-nitipi skandal ini pada tanggal 5 Agustus dan terungkap bahwa Nixon memerintahkan penyelidikan untuk dihentikan, memerintahkan FBI untuk menghalangi

---

<sup>19</sup> Genovese, *op. cit.*, p. 161.

<sup>20</sup> David R. Tarr, *CQ's American Government A To Z Series Congress A To Z Fourth Edition*, ed

penyelidikan kasus itu serta pengetahuannya tentang keterlibatan sejumlah pejabat Gedung Putih dan Komite Pemilihan Kembali Presiden dalam skandal Watergate.<sup>21</sup>

Indikasi lain dari hilangnya legitimasi terhadap Nixon dapat dilihat dari persentase kepercayaan rakyat terhadap keterlibatan Nixon dalam Watergate. Persentase terus naik yang diukur sejak Mei hingga Agustus 1974. Hal ini dapat dijadikan indikasi lain hilangnya legitimasi Nixon dari rakyatnya sendiri. Poling yang menunjukkan dukungan bagi Nixon ketika skandal Watergate mencapai puncaknya pada pertengahan tahun 1974 pun terus merosot hingga hanya 20%.

Dengan hilangnya tingkat kepercayaan baik dari Kongres maupun rakyat melalui poling, merefleksikan bahwa rendahnya legitimasi yang didapatkan Presiden Nixon pada saat itu. Dengan rendahnya legitimasi yang dimiliki, seperti diungkapkan Juergen Habbermas diatas, penguasa akan kesulitan untuk mengelola konflik yang terjadi dan untuk meneruskan kelangsungan Pemerintahannya. Maka, ketika hal tersebut berlangsung Nixon akhirnya lebih memilih untuk mengundurkan diri pada 9 Agustus 1974.

### **E. Hipotesis**

Hipotesa adalah preposisi yang memiliki dukungan teoritis tetapi tidak didukung oleh fakta empiris. Hipotesa yang ada hanya merupakan kesimpulan sementara yang harus dibuktikan kebenarannya.<sup>22</sup>

Dari analisis di atas, didapat sebuah hipotesa, yaitu:

**”Nixon memilih mengundurkan diri sebagai Presiden AS karena Ia kehilangan Legitimasinya sebagai Presiden yang bersumber dari Legislatif dan Masyarakatnya.”**

#### **F. Jangkauan Penelitian**

Untuk menghindari terjadinya pembahasan yang terlalu melebar, maka fokus jangka waktu dalam penulisan ini adalah pada saat Nixon menjadi Presiden untuk pertama kalinya pada tahun 1969 hingga pengunduran dirinya tahun 1974. Batasan waktu tidak mengurangi arti penting kejadian-kejadian sebelum dan sesudahnya yang menjadi titik acuan dalam pembahasan masalah yang ada.

#### **G. Metode Penelitian**

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilaksanakan dengan studi pustaka. Oleh karena itu data yang akan diolah adalah data sekunder yang bersumber dari literatur-literatur, makalah-makalah ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah, surat kabar, internet dan sumber lain yang dianggap relevan dan sesuai dengan objek penelitian skripsi.

## H. Sistematika Penulisan

- BAB I : Berupa pendahuluan, yang terdiri dari: alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar teori, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II : Membahas kesuksesan kebijakan AS masa Pemerintahan Presiden Nixon baik di bidang luar negeri maupun kebijakan domestiknya, hingga terpilihnya kembali Nixon sebagai Presiden AS pada Pemilihan Presiden 1972
- BAB III : Membahas tentang terjadinya skandal Watergate, penutupan skandal oleh Presiden dan sejumlah pembantu dekatnya dalam Pemerintahan, serta Pembongkaran skandal yang menyebabkan jatuhnya sejumlah Pejabat Gedung Putih dalam Pemerintahan Nixon serta diakhiri dengan pengunduran diri Presiden Nixon dari jabatannya.
- BAB IV : Pembuktian Hipotesa, berupa hilangnya legitimasi Nixon dengan melihat 2 indikator, yaitu keluarnya 3 artikel *impeachment* yang diterbitkan oleh *House Judiciary Committee* maupun dari polling yang menunjukkan menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap Nixon.
- BAB V : Kesimpulan.